

MENUJU ERA REFORMASI : PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Ariel Fernandez, Gadis Anggraini Safitri, Siti Tiara Maulia

Universitas Jambi

ariel0003455@gmail.com, gadisanggrainis79@gmail.com

Abstract

Democracy and government are two things related to the constitutional system, both in the capacity of individuals, communities, nations and the international community. Can democracy and governance be related to each other, or are they compatible in building a country? Like the existence of democracy in building a government. This study shows that the values of the early days of Indonesian democracy and government. The method used in this research is the literature review method, which focuses on writing results related to the topic or writing variables. Conclusion: Democracy and Government, with the grace of God Almighty, realizing a better democracy can certainly build a better government.

Abstrak

Demokrasi dan Pemerintahan merupakan dua hal yang berhubungan dengan Sistem ketatanegaraan, baik dalam kapasitas individu, komunitas, bangsa maupun masyarakat internasional. Apakah demokrasi dan Pemerintahan bisa berkaitan satu sama lain, atau apakah mereka sejalan dalam membangun negara? Seperti adanya demokrasi dalam membangun pemerintahan. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai masa awal demokrasi Indonesia dan Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature riview atau kepustakaan, yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Kesimpulan: Demokrasi dan Pemerintahan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan demokrasi yang lebih baik tentunya bisa membangun pemerintahan yang lebih baik.

Pendahuluan

Demokrasi sekarang menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang paling populer di dunia. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa rakyat memberikan kekuasaan dan otoritas pemerintah dan digunakan untuk kepentingan mereka. Demokrasi menekankan hak asasi manusia, kebebasan sipil, keadilan sosial, serta menawarkan pengambilan keputusan yang inklusif, terlibat, dan akuntabel. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang. Itu telah menghadapi banyak masalah dan perubahan dalam struktur politik dan pemerintahannya. Setelah dimulai pada tahun 1998, era reformasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Selama periode ini, Indonesia telah mengalami transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Orde Baru, yang terkenal dengan kekuasaan absolut dan korupsi yang meluas, adalah pemimpin awal pemerintahan Indonesia. Namun, setelah pemerintahan Soeharto runtuh, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahannya. Era reformasi ini ditandai dengan penghapusan otoriter dan pengembangan demokrasi yang lebih inklusif. Demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan besar selama periode reformasi ini. Dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, orang lebih terlibat dalam proses politik. Sekarang ada partai politik baru, dan orang-orang sekarang memiliki lebih banyak

pilihan untuk memilih pemerintahan yang mereka inginkan. Selain itu, perubahan yang dilakukan pada sistem pemerintahan telah membuat pengelolaan pemerintah lebih jelas dan lebih dapat diawasi. Ini membuatnya lebih mudah bagi masyarakat untuk melihat dan mengawasi apa yang terjadi dengan pemerintah. Namun demikian, era reformasi ini juga telah menghadapi banyak masalah. Korupsi dan nepotisme masih merupakan masalah besar dalam pemerintahan Indonesia. Partai politik masih sangat kuat dan dapat memengaruhi pemerintahan. Selain itu, kepentingan dan pendapat yang berbeda dalam masyarakat telah menyebabkan konflik dan ketegangan dalam proses politik.

Jurnal ini akan membahas evolusi demokrasi dan pemerintahan Indonesia selama era reformasi. Kita akan melihat bagaimana reformasi telah mengubah sistem politik dan pemerintahan negara tersebut, serta tantangan yang dihadapi selama periode ini. Kita juga akan membahas bagaimana kemajuan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode literature review. Literature review merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Menurut Setiawan (2019) literature review merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan serta mutakhir dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literature review atau studi kepustakaan yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Setelah data-data terkumpul, lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi pertama kali muncul di Athena Kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ini dianggap sebagai awalan dari sistem hukum demokrasi modern. Namun, artinya berkembang seiring dengan waktu, dan sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan komposisi demokrasi, pengertiannya sudah berubah secara lambat (Nihaya, 2016:15). Demokrasi disebut juga disebut pemerintahan rakyat. Dalam bidang ilmu politik, gagasan tentang demokrasi adalah hal yang sangat penting. Hal wajar karena saat ini demokrasi dianggap sebagai ukuran kemajuan politik negara (Nihaya, 2016:15).

Demokrasi adalah jenis pemerintahan dimana rakyat memegang kendali atas politik. Demokrasi adalah sistem politik di mana pemilihan umum yang dilakukan secara adil dan bebas digunakan untuk membuat keputusan politik. Rakyat dalam sistem demokrasi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memilih pemimpin mereka sendiri. Demokrasi sangat penting dalam hubungan kekuasaan negara, yang didasarkan pada konsep trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dimana kekuasaan negara harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam bukunya ilmu negara, Ni'matul Huda menyatakan bahwa ada dua peristiwa penting dalam Sejarah teori demokrasi. Pertama, sebagian besar orang di zaman sekarang menganggap dirinya sebagai demokrat. Namun, apa yang mereka

lakukan sangat berbeda dengan yang apa mereka katakan. Kemudian yang kedua, lembaga politik banyak negara demokrasi menyatakan kerawanan dan kerapuhan sistem demokrasi. Sejarah Eropa abad ke-20 menunjukkan bahwa membangun dan mempertahankan demokrasi adalah hal yang sulit.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi dua tahap yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami variasi dari saat kemerdekaan hingga saat ini. Permasalahan utama saat ini adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, seperti politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Dalam konteks tatanan kehidupan demokratis, masalah utama terkait dengan hubungan antara negara atau pemerintah dengan rakyatnya sendiri, atau hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan dan pengawasan satu sama lain.

Secara historis, perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu

1. Demokrasi parlementer (1945-1959)

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem demokrasi parlementer diterapkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Dalam era ini, ada parlemen yang kuat, kabinet yang memimpin parlemen, dan pemilihan umum untuk wakil rakyat. Dalam sejarah politik bangsa Indonesia, demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintahan negara dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi parlementer. Periode ini dimulai Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dan berlanjut hingga tahun 1959. Indonesia menerapkan demokrasi parlementer yang dimodelkan oleh negara Belanda pada awal kemerdekaannya. Sistem ini memverifikasi pemerintahan legislatif yang kuat dengan parlemen sebagai lembaga tertinggi. Saat itu, ada banyak partai politik yang berbeda, sehingga ada stabilitas politik yang relatif. Pada masa itu, peristiwa yang sangat penting terjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) ditandatangani pada tahun 1950. Konstitusi ini menggantikan UUD 1945 yang dibuat saat Konferensi Meja Bundar (KMB). Konstitusi RIS membuat sistem pemerintahan federal dengan negara bagian yang lebih otonom, tetapi sayangnya sistem ini tidak berhasil dan akhirnya diakhiri pada tahun 1959. Saat era ini, banyak partai politik yang sangat berpengaruh dalam politik Indonesia. Beberapa partai politik yang sangat populer pada masa itu seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Katolik adalah semua partai politik. Meskipun mereka memiliki ideologi yang berbeda, partai-partai tersebut membentuk koalisi pemerintahan yang disebut Serikat Nasional Indonesia. Namun, ketegangan politik muncul selama periode ini, konflik antar partai-partai politik, terutama konflik politik antara PNI dan PKI yang semakin memanas. Kondisi politik ini juga semakin tidak stabil, yang akhirnya menyebabkan PRRI atau Permesta Pada tahun 1950, Ketika beberapa daerah di Indonesia memberontak terhadap pemerintah pusat akibat kesenjangan politik yang terjadi. Selain itu, pada akhir tahun 1950, keadaan politik menjadi semakin tidak terkendali, dan pemerintahan demokrasi parlementer mulai terancam. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno secara resmi memutuskan untuk membubarkan demokrasi parlementer dan mulai era baru dengan demokrasi terpimpin, yang berlangsung hingga tahun 1965.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Selain demokrasi parlementer, Indonesia juga pernah menganut demokrasi terpimpin. Ini dimulai pada tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1965, saat Presiden Soekarno turun dari jabatannya. Pada saat itu, Presiden Indonesia yang masih

menjabat sebagai presiden Indonesia, mengusulkan gagasan atau model gagasan atau model demokrasi terpimpin sebagai alternatif untuk sistem demokrasi parlementer yang telah dihapus sebelumnya. Rancangan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno ini didasarkan pada sudut pandang politiknya yang mencakup katigaisme, nasionalisme, dan anti-imperialisme. Ia berpendapat bahwa sistem demokrasi parlementer sebelumnya tidak sesuai dengan situasi saat ini dan kondisi negara Indonesia, dan ia menyarankan penggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin. Selama periode ini, sistem politik didominasi oleh peran presiden, partai politik terbatas, pengaruh komunis meningkat, dan ABRI menjadi bagian sosial politik yang lebih besar. Pada periode ini, terjadi banyak distorsi terhadap demokrasi dalam operasi pemerintahan. Presiden akan memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi terpimpin ini, dengan peran parlemen yang lebih terbatas daripada demokrasi parlementer sebelumnya. Presiden memiliki otoritas yang cukup besar juga dalam mengambil keputusan politik serta dapat mengontrol arah Pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Pada akhirnya, pemerintahan akan disusun dalam sistem “fungsional” yang terdiri dari berbagai lembaga yang mewakili berbagai kelompok sosial, seperti petani, buruh, intelektual, dan tani. Namun, demokrasi terpimpin yang berjalan di Indonesia saat pemerintahan Presiden Soekarno banyak sekali mengalami kritik dan kontroversi. Salah satunya peristiwa yang sangat meninggalkan ingatan adalah peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965 dan menyebabkan kejatuhan Soekarno. Kemudian, Soeharto naik ke kekuasaan sebagai presiden melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang mewajibkan Soeharto untuk menuntaskan para PKI. Soeharto menjadi presiden dan mengubah sistem politik Indonesia menjadi Orde Baru, yang juga otoriter. Setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi baru yang lebih mirip dengan demokrasi liberal, yaitu demokrasi Pancasila yang digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Namun, istilah “demokrasi terpimpin” saat pemerintahan presiden Soekarno masih sangat diingat dalam Sejarah politik sebagai periode yang sangat kompleks serta kontroversial dalam perkembangan demokrasi Bangsa Indonesia.

3. Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1965-1998)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang menempatkan sistem presidensial sebagai pilar utama. Pemerintahan ini muncul setelah G30S/PKI gagal. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Tujuan utama dari periode ini adalah untuk mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang konsekuen dan murni berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPR. Keinginan untuk memperbaiki atau mengembalikan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni adalah semangat motivasi yang mendasari munculnya fase ini (Purnamawati, 2020:257).

Demokrasi Pancasila menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi termasuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan pers. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, warga Indonesia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses keputusan politik dan memengaruhi arah pembangunan negara. Pada masa ini, kedaulatan rakyat adalah dasar demokrasi karena setiap warga negara atau rakyat memiliki hak yang sama untuk mengatur dan menetapkan haknya sendiri. Selain itu, partisipasi politik yang sama untuk setiap orang. Dengan demikian, pemerintah seharusnya selalu memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negaranya saat mereka melaksanakan hak politik mereka. Namun, demokrasi Pancasila di bawah

pemerintahan orde baru hanyalah sebuah gagasan yang diucapkan, dan belum sampai pada tahap implementasi praktis. Karena rezim inilah yang tidak memungkinkan kehidupan berdemokrasi dalam praktik pemerintahan (Purnamawati, 2020:257).

4. Demokrasi di Era Reformasi (1998-sekarang)

Lengsernya presiden terdahulu, soeharto, yang menjabat selama sekitar 32 tahun, menandai pelaksanaan demokrasi di era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi Indonesia di era reformasi membentuk dasar yang kuat untuk demokrasi Indonesia yang akan datang. Mereka menemukan beberapa indikator penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, termasuk penerapan sistem multipartai dan kebebasan pers, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam masalah nasional. Sistem multipartai mulai diterapkan pada pemilu 1999. Saat ini, rakyat memiliki kesempatan untuk Bersatu dan berkumpul sesuai dengan keyakinan dan tujuan politik mereka (Purnamawati, 2020:257-258). Dengan berpegang pada Pancasila selama era reformasi, demokrasi reformasi merupakan demokrasi yang membawa perubahan. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan dan kemajuan yang telah lama diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Ciri khas yang menonjol di era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan oleh warga negara. Adanya pemilihan yang lebih demokratis dan perputaran kekuasaan di pemerintah pusat dan daerah adalah tanda demokrasi di era reformasi. Rekrutmen politik dan rekrutmen politik untuk jabatan politik dilakukan secara terbuka untuk melindungi hak dasar warga negara. Hak-hak warga negara dilindungi dan dijamin, dan sebagian besar hak asasi rakyat dapat dilindungi, termasuk kebebasan pers, kebebasan dalam menyatakan opini, dan sebagainya (Purnamawati, 2020: 258).

Perkembangan Pemerintahan di Indonesia

1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1959)

Menurut hukum tata negara, ketika Indonesia mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan 1945, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari tatanan hukum sebelumnya, yaitu hukum Hindia Belanda dan hukum pendudukan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia membuat tatanan hukum baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia dan ditetapkan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa tersebut. (Joeniarto, 2001:20).

Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras untuk membangun lembaga pemerintahan seperti suatu negara merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI berkumpul untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan diumumkan. Soekarno dan Hatta merencanakan untuk menambah sembilan anggota baru, termasuk pemuda seperti Chairul Saleh dan Sukarni. Namun, para Pemuda akhirnya meninggalkan tempat karena mereka percaya bahwa PPKI didirikan oleh Jepang.

Pertama, Pengesahan UUD 1945 pada konferensi pertama PPKI diadakan di Pejambon, Jakarta. Sebelum itu, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk menyelidiki rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya." Ini diminta karena orang-orang dari agama lain mungkin tidak setuju. Di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, rapat pleno kemudian dimulai pada pukul 11.30. Rapat berlangsung lancar dalam membahas UUD ini; selama sekitar dua jam, mereka berhasil mencapai kesepakatan bersama tentang rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta, yang

diusulkan oleh BPUPKI, telah disahkan menjadi UUD dengan sedikit perubahan. Itu terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan, bersama dengan penjelasan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk berpartisipasi dalam kehidupan internasional dan menetapkan garis besarnya sendiri.

Kedua, Pilpres dan Wapres, Otto Iskandardinata memimpin dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta sebagai wakil presiden dan presiden. Hal ini jelas sesuai dengan Konstitusi yang baru saja disahkan. Setelah musyawarah untuk mufakat, peserta sidang secara aklamasi menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan demikian, Soekarno resmi menjadi Presiden Republik Indonesia Pertama secara konstitusi Negara Republik Indonesia.

Ketiga, Pembagian Wilayah Indonesia, pada sebuah rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia yang terdiri dari bekas jajahan Hindia Belanda menjadi delapan provinsi. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Sumatera adalah delapan provinsi, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

Keempat, Pembentukan Departemen Kementerian, Panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Soebardjo, menyampaikan laporannya setelah rapat menetapkan wilayah. Ada 13 kementerian yang diajukan oleh Panitia Kecil tersebut. Setelah itu, sidang memeriksa usulan tersebut dan menetapkan kementerian. Setelah itu, rapat memutuskan bahwa akan ada dua belas departemen dan empat kementerian negara.

Kelima, Pembentukan Komite Nasional Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mewakili keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI, kecuali Soekarno dan Hatta, menjadi anggota KNIP, yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai wakil I, Mr. J. Latuharhary sebagai wakil II, dan Adam Malik sebagai wakil III, KNIP memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan berhak untuk berpartisipasi dalam menetapkan GBHN.

Keenam, membentuk Kekuatan Keamanan dan Pertahanan yang berdasarkan keputusan rapat yang dibuat pada 22 Agustus 1945, KNIP dan BKR didirikan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi BKR sebagai badan keamanan. Anggota BKR sebagian besar adalah bekas anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Kaprawi terpilih sebagai pimpinan BKR pusat. Soekarno memanggil Oerip Soemohardjo, mantan Mayor KNIL, dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas untuk membentuk tentara nasional. Menurut informasi yang diberikan oleh presiden Republik Indonesia, TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berdiri pada tanggal 5 Oktober. Terpilih sebagai pimpinan TKR adalah Soepriyadi, yang merupakan tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar. Namun, Soepriyadi tidak aktif menjabat, sehingga diadakan pemilihan untuk pimpinan tertinggi TKR. Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/Banyumas, dipilih. Soedirman mendapatkan pangkat jenderal sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945, sementara Oerip Soemohardjo tetap sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jenderal. Tanggal 14 November 1945, seorang sosialis bernama Sutan Sjahrir

menggantikan Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik. Sutan Sjahrir dianggap cocok untuk menjadi pemimpin diplomatik, mengingat partai sosialis sedang berkembang di Belanda. Sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berubah dari presidensiil menjadi parlemen memungkinkan perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Inggris dan Belanda melihat Sutan Sjahrir sebagai seorang moderat, intelektual, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Dalam UUD 1945, sistem Parlemenarisme yang presidensial menimbulkan instabilitas karena nasib kabinet ditentukan oleh BP KNIP dan bukan oleh presiden. Presiden hanyalah berfungsi sebagai Kepala Negara, bukan sebagai kepala eksekutif, peran yang dilakukan oleh perdana menteri. Saat Republik Indonesia Serikat didirikan pada Desember 1949, ada tiga Perdana Menteri yakni Hatta, Sutan Sjahrir, dan Amir Sjarifuddin. Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri dua kali, dan Hatta memimpin kabinet presidensial, tetapi tetap bertanggung jawab kepada BP KNIP.

2. Masa Orde Lama (1959-1965)

Dengan berbagai kostum, lokasi, karakter, dan alur cerita, kita telah menghadapi panggung sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan selama hampir 57 tahun. Karena kecenderungan mereka untuk menjadi unik dan stereotip, setiap pentas sejarah memiliki karakteristik yang membedakannya satu sama lain. Masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia dikenal sebagai Orde Lama. Orde Lama berkuasa dari 1945 hingga 1965. Selama periode ini, Indonesia berganti-ganti antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Indonesia memiliki sistem ekonomi liberal dengan pemerintahan parlementer. Era orde lama, atau Orla, dikenal sebagai era demokrasi terpimpin. Menurut perspektif saat ini, ketatanegaraan dimulai dengan dekrit presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri ketidakpastian dan konflik ketatanegaraan. Kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 menandai kembalinya era pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Produk yang dibuat pada saat itu, seperti Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 tahun 1959 dan Nomor 5 tahun 1960, merupakan dasar hukum untuk pengaturan pemerintahan daerah. bahwa DPR adalah produk hukum yang tidak ada dalam UUD 1945. Dalam struktur politik Orde Lama, Indonesia memiliki rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk hukum konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik dengan ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada saat ini, politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik, yang ditunjukkan oleh revolusi fisik dan sistem otoriter yang merupakan dasar feodalisme. budaya politik patrimonial (era Orde Lama) dan otoriterianisme politik masih berkembang di kalangan politisi dan pejabat pemerintah. Orang-orang mulai memperhatikan input politik, tetapi mereka tidak sebanding dengan para politisi karena mereka masih bergantung pada budaya politik lama. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang cenderung melibatkan subjek politik.

Presiden Soekarno digulingkan saat Indonesia menerapkan sistem ekonomi diktator. Dengan menggunakan konstitusi yang dibuat beberapa hari sebelumnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menunjuk Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada 18 Agustus 1945. Hingga pemilu dilakukan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk sebagai parlemen sementara. Pada tanggal 31 Agustus, kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru dan menginginkan Republik Indonesia yang terdiri dari delapan provinsi: Sumatra, Kalimantan (bukan wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (bukan Papua) dan Nusa

Tenggara. Hubungan antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sangat dinamis, bahkan kadang-kadang terjadi konflik. Ketidaksepakatan ini mencapai puncaknya. Pada 21 Februari 1957, di Istana Merdeka, Presiden Soekarno menyampaikan gagasan Demokrasi Terpimpin kepada para tokoh masyarakat dan pemimpin partai setelah pemilihan umum 1955. Soekarno menyampaikan Konsepsi Presiden, yang mencakup :

- Berhaluan Barat, sistem Demokrasi Parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin karena tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia.
- Berdasarkan kekuatan yang ada dalam masyarakat, untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin, perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi. Selain itu, dalam perspektif Presiden, diperlukan pembentukan Kabinet Kaki Empat, yang melibatkan keempat partai besar: PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan dari kabinet ini adalah untuk mewujudkan kegotongroyongan nasional.
- Membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari kelompok fungsional masyarakat. Salah satu fungsi utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada Kabinet, baik secara resmi maupun tidak resmi.

3. Masa Orde Baru (1965-1998)

Setelah pemerintahan Presiden Soekarno mengakhiri Orde Lama, Presiden Soeharto mengambil alih dan mengubah politik dan cara pemerintahan Indonesia. Pada awal pemerintahannya, Soeharto mencanangkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang bertujuan untuk membawa Indonesia ke tahap kedewasaan (maturing society). Selama Orde Baru, pemerintah menekankan stabilitas politik nasional. Untuk mencapainya, konsensus nasional dimulai. Konsensus nasional terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama disebut "konsensus utama". Konsensus kedua adalah tentang bagaimana konsensus utama diterapkan. Konsensus kedua terbentuk antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Dengan mengurangi jumlah partai politik dalam pemilu, pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis massa luas. Hal ini dilakukan berdasarkan semangat kesepakatan nasional.

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan mengakhiri konflik dengan Malaysia dalam politik luar negeri. Karena Presiden Soekarno memiliki keberanian untuk menentang kebijakan Barat dan mengambil posisi yang berseberangan dengan negara Barat dalam beberapa situasi, dan dia juga menjalin hubungan dekat dengan negara Komunis, yang menghasilkan pembentukan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Pada masa Orde Baru, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Soeharto lebih santai dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Soeharto menerapkan kebijakan yang lebih pro Barat atas nama pembangunan nasional dan mengubah kebijakan 5 yang keras terhadap negara-negara dikawasan menjadi kebijakan yang lebih "bersahabat", dan mencoba mendapatkan kepercayaan negara-negara di kawasan dan internasional dengan meyakinkan mereka dengan mendirikan ASEAN. Pada masa kepemimpinan Soeharto, orang menyadari bahwa stabilitas politik adalah syarat penting untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, muncul keinginan yang serius untuk menata kembali sistem politik Indonesia untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini perlu dilakukan karena saat ini prioritas pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi internasional yang bercorak kapitalis.

Pada masa orde baru pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami banyak perubahan hingga krisis ekonomi melanda negara itu pada tahun 1998. Hingga 32 tahun Orde Baru berlangsung, tidak pernah terjadi pergeseran kekuasaan politik. Pemilihan hanya dijadikan rutinitas lima tahunan dengan pemenang sudah jelas. Selama Orde Baru, pemilu menjadi tidak demokratis, dengan peran pemerintah yang dominan dan keterlibatan masyarakat yang rendah. Selain itu, semua pegawai negeri hanya memilih Partai Golkar, yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Soeharto menggunakan Partai Golkar sebagai alat politik yang efektif untuk melindungi setiap keputusan politik pemerintahannya di DPR, yang pada gilirannya membatasi hak-hak dasar warganegara. Bahkan dengan menggunakan kekuatan militer, mereka menekan orang-orang yang menentang pemerintahan yang otoriter dan mengkritik rezimnya, yang menyebabkan peningkatan korupsi. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Penerangan memegang kendali atas semua media, menghambat demokrasi.

Untuk mencapai pembangunan nasional, pemerintahan politik di masa Orde Baru menggunakan asas Pancasila sebagai dasar. Melalui penataran P-4, atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan program Repelita, pemerintah mengatur kehidupan politik warganegara, serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Runtuhnya kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi tahun 1998 yang dimotori mahasiswa memberikan perlawanan terhadap pemerintahannya telah memberikan sebuah harapan bagi terciptanya iklim demokrasi yang jauh lebih baik.

4. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Era reformasi adalah periode transisi dari masa Orde Baru yang tertutup dan otoriter ke masa Reformasi yang lebih demokrasi. Pola kepemimpinan juga berubah selama reformasi. Pada awalnya, perempuan tidak diperhitungkan dalam dunia perpolitikan atau kepemimpinan. Namun, selama era reformasi, perempuan mulai diperhitungkan dalam dunia perpolitikan, ditandai dengan undang-undang yang memberikan lebih banyak ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di Indonesia. Dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, terjadi pergeseran politik besar dengan konsekuensi yang luas, salah satunya adalah kembalinya demokrasi ke kehidupan politik nasional. Pada tahun 1999, pemilihan LUBER yang sebenarnya diikuti oleh 48 partai politik. Disebabkan oleh demokratisasi ini, hubungan antara Presiden dan DPR mengalami perubahan yang signifikan. Jika DPR hanya berfungsi sebagai tukang stempel pada masa lalu, sekarang mereka bertindak sebagai pengamat presiden. Di sini diusahakan untuk mengadopsi suatu model atau format politik yang tidak lagi terlalu berfokus pada eksekutif (atau bahkan dominan) seperti pada masa Orde Baru, dan juga tidak terlalu berfokus pada legislatif seperti pada masa orde lama atau Demokrasi Parlementer, yang sudah dianggap negatif.

Pemerintahan B.J. Habibie dimulai setelah Soeharto lengser dari kedudukannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, dengan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini membuat kebijakan seperti kebebasan berpendapat dan perlindungan keamanan melalui pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan pemilu dari tahun 2003 hingga 1999, dan pemutusan hubungan organisatoris ABRI dengan partai politik dan partai politik lainnya. Pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia, menggantikan pemerintahan Habibie, yang hanya berlangsung satu tahun setelah lengsernya Soeharto.

Gusdur melakukan banyak upaya untuk mendukung kaum minoritas. Misalnya, dia mengizinkan perayaan imlek, yang sebelumnya dilarang oleh Soeharto, dan meminta agar TAP MPR dicabut karena pelanggaran marxisme-leninisme. Hal ini cukup kontroversial karena PKI (yang terkait dengan marxisme-leninisme) telah dihitamkan pada masa Soeharto. Gusdur menunjukkan adanya persamaan derajat antarawarga dengan memberikan keadilan kepada kaum minoritas. Gusdur sering melakukan kunjungan keluar negeri selama masa jabatan yang sangat singkat untuk meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia dan memungkinkan kerja sama antar negara. Selain itu, Gusdur melakukan perdamaian dengan Israel dengan mendukung Palestina dan mempertahankan kebebasan beragama.

Setelah Gusdur, masa pemerintahan Megawati ditandai dengan konsolidasi demokrasi yang lebih kuat di Indonesia. Pemilihan umum presiden secara langsung, yang dianggap sebagai salah satu keberhasilan demokratisasi, menstabilkan dasar ekonomi makro, stabilisasi politik domestik, dan politik internasional yang lebih bebas dan aktif. Meskipun demikian, Megawati dianggap tidak berhasil melaksanakan rencana reformasi birokrasi, mengatasi krisis nasional, dan cenderung mengabaikan keinginan rakyat dan berfokus pada kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, dia tidak berhasil menghindari tekanan negara asing.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat selama dua periode sebagai presiden setelah Megawati. Pemerintahan SBY-Kalla telah menetapkan sasaran utama untuk pembangunan selama lima tahun dari 2004 hingga 2009. Sasaran-sasaran tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) pada tahun 2004 menjadi 5,1 persen (5,7 juta jiwa) pada tahun 2009, penurunan tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta jiwa) menjadi 8,2 persen (18,8 juta jiwa) pada tahun 2009, dan penurunan tingkat kemiskinan dari 16,6. Antara tahun 2009 dan 2014, pemerintahan SBY-Boediono memiliki karakteristik yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan ini mengubah banyak kebijakan ekonomi, terutama yang mengarah ke USA yang telah dianut sejak era Orde Baru ke arah RRC dengan program pembangunan berkelanjutan.

Tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti apakah cita-cita reformasi telah terwujud sejak Presiden Jokowi terpilih. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa struktur politik demokratis akan berjalan, budaya politik yang semakin berfokus pada kekuasaan telah menyebabkan struktur politik demokrasi tidak berfungsi dengan baik. Budaya politik tidak berubah, meskipun struktur dan fungsi politik berubah. Akibatnya, terjadi paradoks.

Kesimpulan

Rakyat sekarang dapat menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam politik selama era reformasi. Selain itu, merupakan jenis budaya politik di mana anggota komunitasnya memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek yang menentukan budaya politik. Mereka memahami sistem politik secara keseluruhan dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan memiliki keterlibatan aktif dalam proses politik. Dalam semua dimensi di atas, masyarakat cenderung terlibat secara aktif dalam peran pribadi, meskipun perasaan dan persepsi mereka tentang peran tersebut bisa bersifat menerima atau menolak.

Situasi politik Indonesia saat ini mengalami gelombang naik turun. Yang mana kekuasaan presiden tidak sepenuhnya digunakan dalam pemerintahan, tapi hal ini akan memengaruhi parlemen. Ini pada akhirnya menyebabkan keadaan politik yang tidak sehat, karena kepentingan lain dapat mempengaruhi presiden. Namun, kritik masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat disebabkan oleh tempat dan kesempatan

yang semakin meningkat untuk partisipasi masyarakat. Kritik terhadap individu, kelompok, lembaga, dan lembaga pemerintah dilakukan dengan berbagai macam media. Setiap kelompok masyarakat sekarang dapat berbicara tentang masalah politik Indonesia secara terbuka. Jadi, ketika politik Indonesia berkembang setelah Orde Baru selama era reformasi ini, sistem demokrasinya terus berubah untuk mencapai tatanan nasional yang ideal.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635.
- Alam, W. T., (2003), *Demi Bangsaiku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, SM. 1967. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang
- Djoened, M., Nugroho, P., 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).
- Joeniarto. 2000. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaban, R. (2000). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Perspektif*, 5(3), 158-169
- Nasution, Buyung, A. (2004). *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi*, Jakarta : Otobiografi Aksara Karunia.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Rahman, M. (2021). *DINAMIKA SERTA PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA*.